

---

## **Impor Pangan dan Perburuan Rente Perspektif Ekonomi Politik**

**Abdul Aziz SR**

Progam Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

(email: [abdulazizsr@ub.ac.id](mailto:abdulazizsr@ub.ac.id))

### **Abstract**

The food import policies of the Joko-JK and Joko-Ma'ruf governments are often questioned and criticized by various groups. For at least three reasons. First, since the 2014 Presidential Election campaign, the Joko-JK pair declared “war” on food imports. There are promises that are often repeated –until when they are elected– not to import food such as rice, meat, salt, sugar, and others. Second, domestic potential can actually be optimized to meet food needs. The government itself provides a written commitment to self-sufficiency in food. Third, food import policies are often ineffective, because apart from not making prices stable, the elites are also more interested in them. Food imports that flowed heavily from the Joko-JK era to the Joko-Ma'ruf period lacked an objective (economic) reason, but rather because of the interest of rent-seeking by rent-seekers. This policy actually reinforces extractive economic practices, rather than efforts to improve the welfare of the societies.

### **Keyword:**

food import policy; rent-seeking; extractive economy

### **Abstrak**

Kebijakan impor pangan pemerintahan Joko-JK dan Joko-Ma'ruf seringkali dipersoalkan dan dikritik berbagai kalangan. Setidaknya karena tiga alasan. *Pertama*, sejak masa kampanye Pemilihan Presiden tahun 2014 pasangan Joko-JK menyatakan “perang” terhadap impor pangan. Ada janji yang sering diulang-ulang –hingga ketika sudah terpilih– untuk tidak akan melakukan impor pangan seperti beras, daging, garam, gula, dan lainnya. *Kedua*, potensi dalam negeri sesungguhnya sangat bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pemerintah sendiri memberikan komitmen tertulis untuk melakukan swasembada pangan. *Ketiga*, kebijakan impor pangan seringkali tidak efektif, sebab selain tidak membuat harga-harga stabil juga lebih besar kepentingan elite di dalamnya. Impor pangan yang mengalir deras sejak era Joko-JK hingga masa Joko-Ma'ruf kurang memiliki alasan (ekonomi) yang objektif, melainkan karena kepentingan memburu rente oleh para *rent-seekers*. Kebijakan tersebut justru meneguhkan praktik ekonomi ekstraktif, ketimbang upaya menyejahterakan masyarakat.

### **Kata Kunci:**

Kebijakan impor pangan; perburuan rente; ekonomi ekstraktif

## **Pendahuluan**

Pemerintahan Joko Widodo –di periode pertama– sejak awal menjanjikan sesuatu yang (kelak) lebih baik dalam menyediakan bahan pangan bagi rakyat. Melalui dokumen Nawacita-nya, Joko Widodo-Jusuf Kalla (selanjutnya disebut Joko-JK) menegaskan prioritas pembangunan yang hendak dilakukan. Pada poin ketujuh dikatakan: “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Poin inilah yang menjadi “induk” dari kebijakan pangan rezim pemerintahan Joko-JK (Kemenko Bidang Perekonomian RI, 2015: 12-13).

Pada tahun-tahun awal pemerintahannya, Joko-JK tampak berusaha keras mewujudkan kondisi pangan serta meningkatkan ketersediaannya terutama yang berbasis produksi dalam negeri. Ada pula keinginan pemerintah untuk swasembada pangan dan menciptakan kedaulatan pangan, sebagaimana sering dikemukakan oleh Presiden Joko sendiri serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan.

Terlihat pemerintah merancang sejumlah agenda agar bahan pangan –dalam berbagai jenisnya– selalu tersedia. Selain itu, ada semacam kekhawatiran di kalangan pemerintah bahwa stabilitas politik dan sosial dapat terganggu jika bahan pangan (terutama yang bersifat pokok seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur-mayur, cabai) mengalami kelangkaan di pasaran. Untuk itu, pemerintah menempuh berbagai macam cara –misalnya meningkatkan produksi dalam negeri dan mengimpor– agar bahan pangan selalu tersedia.

Namun, peningkatan produksi pangan dalam negeri sepertinya mengalami berbagai kendala yang tak mudah (untuk tidak mengatakan tidak bisa) diatasi oleh pemerintah sehingga kondisi ke arah ketidakterediaan atau kelangkaan bahan pangan sulit dielakkan. Pemerintah pun menempuh kebijakan impor sebagai jalan keluar. Barang-barang kebutuhan pokok kemudian banyak sekali yang diimpor.

Impor pangan terkadang harus ditempuh dan sulit untuk tidak melakukannya terutama bahan pangan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri atau sulit dipenuhi dengan mengandalkan produk dalam negeri. Namun demikian, kebijakan impor pangan selain memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat (terutama petani), juga punya rentetan dengan berbagai isu lainnya menyangkut kepentingan rezim penguasa dan kelompok-kelompok tertentu di sekitar lingkaran kekuasaan.

Persoalannya, mengapa harus impor dan apakah *timing*-nya tepat untuk itu? Siapa yang bermain? Siapa yang paling diuntungkan dengan kebijakan impor itu? Pihak mana pula yang paling dirugikan? Lalu, bagaimana proses terbentuknya kebijakan tersebut serta siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya? Itulah bagian dari pertanyaan yang sering muncul dari berbagai kalangan merespons kebijakan impor pangan pemerintahan Joko-JK dan Joko-Ma’ruf selama ini.

Studi ini mempersoalkan dua hal. Pertama, bagaimana potret kebijakan impor pangan sejak 2014 hingga 2021? Kedua, bagaimana permainan para pemburu rente (*rent-seekers*) dalam kebijakan impor pangan tersebut? Studi ini berusaha memahami aspek ekonomi politik dari kebijakan impor pangan (beras, gula, bawang, daging, garam) berikut dinamika perburuan rente di dalamnya.

## **Tinjauan Kepustakaan Teori Ekonomi Politik Ekstraktif**

Ahli ekonomi politik Acemoglu dan Robinson mengajukan tesis yang mereka sebut “*extractive political and economic institutions*” (institusi-institusi politik dan ekonomi ekstraktif, selanjutnya disingkat EPEI) dalam menganalisis kebijakan ekonomi. Acemoglu dan Robinson (2012: 124) menjelaskan:

*Extractive institutions, by their very logic, must create wealth so that it can be extracted. A ruler monopolizing political power and control of a centralized state and introduce some degree of law and order and a system of rules, and stimulate economic activity. But growth under extractive institutions differs in nature from growth brought forth by inclusive institutions. Most important, it will be not sustained growth that requires technological change, but rather growth based on existing technologies.*

Di satu sisi, ada upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan, namun di sisi lain diikuti dengan tindakan pengurusan oleh mereka yang berkuasa. Selain memonopoli kekuasaan politik dan pemerintahan, penguasa juga berusaha menegakkan hukum, ketertiban, serta aturan-aturan lainnya dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian.

Acemoglu dan Robinson menjelaskan bahwa faktor penyebab rendahnya produktivitas di suatu negara adalah perilaku ekstraktif badan pengelola pemasaran dan sistem penguasaan tanah tradisional. Mengacu pada tesis Bates (1980-an), Acemoglu dan Robinson menyebutkan bahwa penyebab rendahnya produktivitas pertanian di suatu negara bukanlah faktor-faktor geografis, melainkan oleh praktik permainan harga dari badan pengurus pemasaran hasil bumi, dan kemudian membuat petani tidak tertarik berinvestasi.

Di dalam EPEI terdapat pula suatu “*the vicious circle*” (lingkaran setan) yang dapat membuat terjadinya keterpurukan. Dalam konteks negara-negara sedang berkembang, institusi-institusi ekstraktif umumnya sudah dibangun di era kolonial, namun setelah kemerdekaan pemerintahan baru justru meneruskan sistem tersebut. Negara itu pun tetap berada dalam cengkraman institusi ekstraktif yang tercipta dalam sebuah lingkaran setan. Institusi politik ekstraktif akan memunculkan institusi ekonomi dengan watak serupa yakni memperkaya segelintir orang tetapi menyengsarakan banyak jiwa (Acemoglu dan Robinson, 2012: 342). Dikatakan:

*Those who benefit from extractive institutions thus have the resources to build their (private) armies and mercenaries, to buy their judges, and to rig their elections in order to remain in power. They also have every interest in defending the system. Therefore, extractive economic institutions create the platform for extractive political institutions to persist. Power is valuable in regimes with extractive political institutions, because power is unchecked and brings economic riches (Acemoglu dan Robinson, 2012: 343).*

Jadi, tidak saja memiliki pasukan-pasukan pribadi bahkan tentara bayaran, penguasa –dalam konteks institusi ekstraktif– juga merekayasa pemilihan umum (*election*) untuk mempertahankan kekuasaannya. Berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan status quo dan kemapanan yang sudah tercipta dan dinikmati selama ini.

## **Teori Perburuan Rente**

Ahli ekonomi Andrey Latkov (2014:4) mendefinisikan *rent-seeking* sebagai upaya individu atau kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, sambil memberikan kontribusi negatif pada kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa beberapa sumberdaya tidak diorientasikan untuk tujuan produktif, tetapi struktur hak milik berubah menjadi menguntungkan individu atau kelompok untuk mendapatkannya dalam bentuk sewa surplus.

Menurut Latkov, dalam isu *rent-seeking* sering dikemukakan bahwa biaya pencarian sewa sebagai pengeluaran menyangkut proses: [a] melobi; [b] kegiatan politik; dan [c] penyuaian serta “efek yang memengaruhi” lainnya. Hasil sewa adalah hak ekonomi yang diperoleh, dilestarikan, kemudian diubah dalam wujud sewa. Lisensi yang didistribusikan kembali, pemberian hak monopoli, subsidi, hak milik yang timbul diberikan sebagai contoh “hasil sewa” biasanya. Interpretasi tradisional dari *rent-seeking* menunjukkan bahwa sebagai akibat dari agen ekonomi, masyarakat *rent-seeking* menimbulkan kerugian dalam dua jenis. Pertama, kerugian karena administrasi hak milik yang tidak efisien. Kedua, pengurangan volume produksi karena pemborosan sumberdaya untuk mendapatkan sewa. Dengan demikian, kerugian langsung karena strategi pencarian rente agen mengukur nilai yang disebut biaya *overhead* untuk menciptakan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk redistribusi pendapatan nasional dalam bentuk pendapatan sewa (Latkov, 2014:4).

## **Metodologi**

Studi ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative method*). Suatu metode yang memberi akses untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena (*symptom*, gejala) yang seringkali merupakan sesuatu yang sulit diketahui (Strauss dan Corbin: 1997: 13). Juga, suatu pendekatan yang berorientasi pada kerangka kerja yang interpretatif (Denzin dan Lincoln, 1994: 2). Dalam konteks itu, studi kasus (*case study*) merupakan jenis studi yang dipilih untuk lebih fokus pada tema yang dibahas. Studi kasus berusaha memberikan prinsip-prinsip dalam rangka mendeskripsikan unit (sosial) secara mendalam, detail dalam konteks, dan bersifat holistik (Patton, 1990: 54). Pada dasarnya, studi kasus tidak bisa dilepaskan dari konteks (Yin, 1993: 3). Data yang dihasilkan merupakan data deskriptif yakni berupa ucapan dan catatan/tulisan dari subyek penelitian (Bogdan & Tailor, 1992: 21-22).

Data yang dibutuhkan dalam studi ini sepenuhnya merupakan data sekunder (Patton, 1990: 10). (Semula memang hendak mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah informan, namun kondisi *covid-19* yang masih mengkhawatirkan di tahun 2021 dan setiap kita belum bebas bergerak ke mana-mana, maka akhirnya studi ini hanya bisa mengandalkan data sekunder). Data sekunder diakses dari *website* kementerian/lembaga negara yang berkaitan kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industri. Juga dari hasil wawancara media (cetak dan *online*) dengan sejumlah kalangan seperti pejabat negara, politisi, serta pakar dan pengamat (ekonomi, pangan, dan politik). Hasil kajian kalangan pakar dan pengamat turut pula dimanfaatkan dengan baik, selektif, dan kritis.

Selanjutnya, analisis data menggunakan model analisis “pengembangan teori interpretatif” dari Wuisman (2013: 30-33). Titik tolak proses pengembangan teori interpretatif bukanlah observasi empiris, melainkan pemahaman akan *kenyataan maknawi* yang diekspresikan oleh para anggota kelompok manusia tertentu. Kenyataan

maknawi itu terdiri atas sejumlah keseluruhan hal yang dipakai oleh kelompok manusia tertentu sebagai pembawa makna. Proses pengembangan teori interpretatif berlangsung dalam tiga tingkatan, yakni ekspresi makna oleh peserta disebut pula sistem makna bersama peserta (interpretasi tingkatan ke-1), konsep dan penggolongan disebut pula konsep dan klaisifikasi peneliti (interpretasi tingkatan ke-2), dan dimensi dan konsep pokok disebut pula teori interpretatif peneliti (interpretasi tingkatan ke-3).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Impor Pangan: Dari Beras hingga Cabai**

Dalam konteks politik pangan, terdapat kesamaan antara pemerintah Orde Lama, Orde Baru, dan pemerintah era Reformasi. Kesamaan tersebut adalah komitmen untuk mencapai swasembada beras di tingkat nasional. Melalui program Kesejahteraan Kasimo (1952-1956), ataupun swasembada beras melalui Program Sentra Padi (1956-1965) hingga Repelita I, II, V, VI, dan VII juga menitikberatkan pada swasembada. Orde Baru sempat mengganti orientasi kebijakan pangan dari swasembada beras ke swasembada pangan secara umum pada Repelita 3 dan 4. Hasilnya sempat dirasakan pada tahun 1984 di mana Indonesia mencapai *level* swasembada pangan (Lassa, 2005: 7).

Pemerintahan Megawati (2000-2004) menjiplak kebijakan swasembada pangan dari masa-masa sebelumnya. Pernyataan politik Megawati yang terkenal adalah “tidak ada pilihan lain kecuali swasembada” (Lassa, 2005: 7). Masa Presiden Joko Widodo, setidaknya terbit tiga bentuk regulasi di luar undang-undang, yakni: [1] Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah melalui Perum Bulog; [2] PP No. 13 Tahun 2016; dan [3] Perpres No. 48 Tahun 2016. (Perpres No. 48 Tahun 2016 – diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dari PP No. 13 Tahun 2016). Ketiga peraturan tersebut menugaskan dan memberi kewenangan kepada Perum Bulog untuk mengurus pangan, tidak hanya komoditas beras.

Namun, kebijakan swasembada tersebut seringkali kontras dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan pemerintah. Di tengah klaim pemerintah akan capaian dan keberhasilannya meningkatkan produksi pangan, justru kemudian muncul gelombang impor berbagai komoditas pangan seperti beras, gula, garam, daging, sayuran, dan lain-lain.

Kenyataan tersebut terjadi pada setiap rezim pemerintahan. Di masa Presiden Joko-JK dan Joko-Ma'ruf, impor pangan justru terjadi besar-besaran. Pada saat pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Akhir November 2017, Presiden Joko berucap: "Saya kalau dengar yang namanya impor pangan, itu sedih banget" (*Antara*, 30/11/2017). Jauh sebelumnya, di masa kampanye 2014, Joko-JK menjanjikan untuk membentuk Bank Tani sebagai upaya menekan impor pangan seperti beras, daging, dan bawang sekaligus sebagai lembaga keuangan yang menyediakan permodalan bagi petani serta solusi untuk meningkatkan taraf hidup petani (*Merdeka*, 14/5/2014).

Di dalam visi-misi pada Pilpres 2014, pasangan Joko-JK dengan tegas menyatakan stop impor pangan seperti beras, jagung, dan daging sapi. Juga, stop impor kedelai, bawang merah, dan cabai merah (KPU RI 2014). Tetapi, pada 2018, misalnya, impor pangan Indonesia ternyata masih tinggi. Impor empat komoditas strategis seperti



beras, gandum, gula, dan kedelai, kurang lebih mencapai 19,15 juta ton atau setara US\$ 4,96 miliar atau Rp 67 triliun (*Investor Daily*, 2018). Sementara sebelumnya pada 2016, impor beras, jagung, dan gandum saja mencapai 13,20 juta ton, setara US\$ 2,75 miliar atau Rp 36,18 triliun (*Investor Daily*, 2016).

Sampai September 2018, misalnya, impor beras menembus 2 juta ton. Itu angka tertinggi selama periode pertama pemerintahan Joko-JK. Terasa pahit memang jika dibandingkan dengan tekad untuk mencapai swasembada beras sebagaimana didengungkan semasa kampanye Pilpres 2014 (Faisal Basri, 2018).

**Tabel 1. Impor Beras menurut Negara Asal Utama 2000-2020**

Negara Asal	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Berat Bersih : Ton</b>																					
Vietnam	369 546,8	142 511,8	561 728,9	506 012,8	58 810,1	44 772,5	272 832,7	1 022 834,6	125 070,5	20 970,5	467 369,6	1 778 480,6	1 084 782,8	171 286,6	306 418,1	509 374,2	535 577,0	16 599,9	767 180,9	33 133,1	88 716,4
Thailand	361 734,8	189 655,9	418 697,6	492 114,2	129 421,5	126 408,9	157 983,3	363 640,1	157 007,3	221 372,6	209 127,8	938 695,7	315 352,7	94 633,9	366 203,5	126 745,7	557 890,0	108 944,8	795 600,1	53 278,0	88 593,1
Tiongkok <sup>1</sup>	476 776,7	24 728,5	126 768,4	54 440,4	110,5	1,3	100,0	901,4	3 341,7	5 167,6	3 637,4	4 674,8	3 099,3	639,8	1 416,7	479,9	1 271,9	2 419,0	227,7	24,3	23,8
India	0,1	2 047,1	405 032,2	108 797,4	923,3	327,0	720,6	3 571,8	289,5	473,1	601,3	4 064,6	259 022,6	107 538,0	90 653,8	34 167,5	36 142,0	32 209,7	337 999,0	7 973,3	10 594,4
Pakistan	20 139,1	26 110,0	32 281,4	49 071,0	0,0	0,0	904,3	4 603,6	751,3	501,5	4 992,1	14 342,3	133 078,0	75 813,0	61 715,0	180 099,5	134 832,5	87 500,0	310 990,1	110 516,5	
Amerika Serikat	49 405,2	177 889,1	13 392,9	107 607,6	16 766,7	2 184,2	801,0	821,7	1 411,2	1 323,4	1 644,1	2 074,1	2 445,5	2 790,4	1 078,6	0,0	0,0	0,0	0,0	740,9	0,0
Taiwan	0,0	0,0	3 541,5	9 600,5	10 800,0	0,0	2 500,0	625,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	1 240,0	840,0						
Singapura	2 496,9	7 268,7	21 809,7	4 314,8	6 632,1	1 568,4	468,3	898,2	250,0	10,8	1 506,5	22,5	0,5	0,0							
Myanmar	198,4	25 441,3	111 687,3	41 398,9	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 140,0	11 819,6	18 450,0	15 616,0	8 775,0	16 650,0	57 475,0	41 820,0	166 700,6	57 841,4	
Lainnya	75 367,9	49 080,6	110 439,9	55 148,2	11 119,8	9 290,6	698,3	9 381,2	919,8	414,5	198,4	497,8	749,3	272,5	222,0	1 959,2	815,1	126,2	6,7	93,7	0,7
<b>Jumlah</b>	<b>1 355 665,9</b>	<b>644 732,8</b>	<b>1 805 379,9</b>	<b>1 428 505,7</b>	<b>236 866,7</b>	<b>189 616,6</b>	<b>438 108,5</b>	<b>1 406 847,6</b>	<b>289 689,4</b>	<b>250 473,1</b>	<b>687 581,5</b>	<b>2 750 476,2</b>	<b>1 810 372,3</b>	<b>472 664,7</b>	<b>844 163,7</b>	<b>861 601,0</b>	<b>1 283 178,5</b>	<b>305 274,6</b>	<b>2 253 824,5</b>	<b>444 508,8</b>	<b>356 286,3</b>
<b>Nilai CIF: 000 US\$</b>																					
Vietnam	77 075,6	23 440,6	112 965,1	96 273,1	13 544,1	12 387,4	83 773,4	335 558,8	47 392,1	7 936,9	232 915,7	946 490,1	564 925,7	97 303,3	143 536,0	202 563,1	212 602,8	6 761,3	360 745,6	16 609,5	51 107,5
Thailand	83 408,0	33 756,6	82 566,1	110 447,0	33 023,2	32 489,0	45 399,3	122 425,9	64 721,0	81 959,8	109 133,7	533 001,9	186 171,4	61 787,5	175 387,4	66 772,4	243 131,2	60 286,9	386 533,7	38 561,5	76 301,6
Tiongkok <sup>1</sup>	107 428,4	4 645,6	25 623,5	11 131,6	42,5	4,0	145,0	1 500,6	6 642,4	13 697,0	12 728,5	15 467,1	11 205,6	1 526,5	4 101,5	1 631,0	4 220,7	8 118,7	1 094,1	482,5	479,3
India	0,1	303,7	61 148,0	17 282,7	423,1	317,7	644,2	1 606,2	337,6	791,5	1 767,5	6 307,9	122 189,0	44 989,1	34 299,5	13 671,7	15 795,0	13 397,1	139 158,5	3 018,5	4 849,3
Pakistan	5 231,1	5 045,8	5 464,8	8 198,1	0,0	0,0	188,2	1 247,0	259,2	160,7	1 765,8	6 053,4	52 483,4	29 996,9	23 909,3	62 949,2	49 124,1	34 793,1	134 416,0	67 819,9	41 519,8
Amerika Serikat	13 828,9	52 888,6	3 579,3	22 830,5	5 459,6	778,7	646,9	791,1	1 796,3	2 005,7	1 745,5	2 489,6	2 718,6	2 983,6	1 294,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 229,4	0,3
Taiwan	0,0	0,0	521,6	3 358,1	3 786,5	0,0	935,6	223,6	0,0	0,0	0,0	1 050,0	0,0	465,6	252,0						
Singapura	484,3	1 405,4	3 672,8	821,4	1 698,4	1 880,3	516,2	170,9	465,5	100,0	27,6	981,9	32,2	1,4	0,0						
Myanmar	13,8	3 822,2	16 969,3	6 502,0	427,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419,2	4 754,5	6 498,9	5 082,8	2 732,3	6 382,8	19 546,1	15 161,4	56 287,2	21 147,8
Lainnya	31 659,8	9 604,2	30 016,5	14 578,3	3 348,3	3 641,9	371,7	4 195,3	2 528,8	1 501,6	700,8	902,3	1 142,8	449,2	315,7	1 282,4	585,0	738,5	19,1	245,6	3,4
<b>Jumlah</b>	<b>319 130,0</b>	<b>134 912,8</b>	<b>342 527,1</b>	<b>291 422,9</b>	<b>61 752,8</b>	<b>51 499,0</b>	<b>132 620,5</b>	<b>467 719,4</b>	<b>124 142,8</b>	<b>108 153,3</b>	<b>360 785,0</b>	<b>1 513 163,5</b>	<b>945 623,2</b>	<b>246 002,1</b>	<b>388 178,5</b>	<b>351 602,1</b>	<b>531 841,6</b>	<b>143 641,7</b>	<b>1 037 128,4</b>	<b>184 254,1</b>	<b>195 409,0</b>

Sumber: BPS, 2021

Sementara itu, di akhir Januari 2018, impor beras masih pada angka 500 ribu ton (dari Thailand dan Vietnam), justru di saat menjelang musim panen. Padahal, tak lama sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meyakinkan publik bahwa tidak akan ada impor beras hingga April 2018. Menurutnya, stok beras saat ini mencapai 1,74 ton. Bahkan, pemerintah sekarang ini juga memiliki serapan beras hingga 8 ribu hingga 9 ribu ton per-hari (*Merdeka*, 13/1/2018). Bandingkan dengan 2011, data Badan Pusat Statistik menunjukkan, impor beras dari sejumlah negara hanya 2,75 juta ton dengan nilai US\$ 1,5 miliar atau 5 persen dari total kebutuhan dalam negeri (Kemenperin, 2018).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito (ketika itu) mengajukan setidaknya empat alasan mengapa pemerintah perlu mengimpor beras. Pertama, beras yang diimpor merupakan beras jenis khusus yang tidak ditanam di dalam negeri. Kedua, pemerintah hendak menekan tingginya harga beras di pasaran. Ketiga, kebijakan impor ditempuh karena stok beras dalam negeri mulai menipis. Di beberapa daerah terjadi kelangkaan pasokan dan mengakibatkan harga beras melambung tinggi. Keempat, beras jenis khusus yang diimpor itu digunakan untuk kepentingan komersil seperti di hotel, rumah makan mewah, dan perusahaan catering (Kemenperin, 2018).

Dalam pandangan pakar bidang pangan dari IPB University Profesor Dwi Andreas Santoso, beras khusus yang dikatakan Menteri Enggartiasto sesungguhnya bukan. Itu bukan beras khusus. Menurutnya, itu pasti beras biasa atau beras umum yang

selama ini sering diimpor untuk menstabilkan pasar. Beras umum yang diimpor itu berada kisaran harga US\$ 350 sampai US\$ 450 juta per-ton. Sementara beras khusus yang beredar hanya 5-10 persen dari total stok beras Indonesia dengan harga US\$ 800 sampai US\$ 900 juta per-ton. Menurut Dwi, tidak mungkin pemerintah menggelontorkan beras kualitas khusus dalam menjalankan operasi pasar. Jika yang diimpor beras biasa, pemerintah diperkirakan mendapatkan keuntungan Rp 1,5 triliun untuk 500 ribu ton beras impor yang seharga US\$ 300 juta per-ton (Metrotvnews, 13/01/2018).

Selain beras, pemerintah juga mengimpor gula mentah (*raw sugar*) sebanyak 1,8 juta ton pada semester pertama 2018 untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Sebelas perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) ditunjuk pemerintah sebagai importir. Gula mentah akan diolah menjadi gula rafinasi untuk kemudian diperdagangkan dengan metode lelang (*secara online*). PT Pasar Komoditas Jakarta ditetapkan Kementerian Perdagangan sebagai penyelenggara pasar lelang gula kristal rafinasi tersebut.

Ada obral lisensi impor *raw sugar* yang menjadi bahan baku gula rafinasi. Berdasarkan data statistik, Indonesia merupakan pengimpor gula terbesar di dunia. Data ini terkonfirmasi oleh data International Trade Center (ITC) yang berada di bawah World Trade Organization (WTO), USDA (United States Department of Agriculture), dan BPS. Dari data BPS, impor gula (HS 1701) Indonesia melonjak sejak 2009 dan meroket pada 2016. Hingga November 2018, impor gula sudah mencapai 4,63 juta ton, sehingga untuk keseluruhan tahun 2018 sangat berpeluang memecahkan rekor tertinggi baru untuk impor gula. Namun, obral lisensi impor *raw sugar* di dalam negeri melampaui kebutuhan industri makanan dan minuman. Pada gilirannya, kondisi ini merugikan petani, karena para pedagang tentu saja *enggan* menyerap gula petani yang memang harganya lebih mahal. Akibatnya, petani kian *enggan* menanam tebu, mengakibatkan produksi gula nasional berpotensi turun atau setidaknya stagnan di kisaran 2 (dua) juta ton setahun (*Katadata*, 16/01/2019). Tetapi memang gula yang biasa digunakan untuk bahan aditif makanan dan minuman 70 persen impor. Thailand menjadi negara terbesar pemasok gula di dalam negeri (Tim Riset CNBC Indonesia, 2021).

Padahal, Indonesia sesungguhnya pernah memiliki masa kejayaan industri gula di dekade 1930-an. Namun, memasuki awal masa kemerdekaan industri gula nasional berada dalam keadaan stagnan. Ketika krisis ekonomi 1997/1998 kondisi industri gula Indonesia terpuruk. Pemerintah pun mengendorokan program Tebu Rakyat Intensifikasi. Indonesia kini menjadi surga para importir gula, baik legal maupun ilegal (*Hukumonline*, 27/10/2010).

Lalu, daging sapi pun impor. Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015 – 2019, sasaran atau target impor daging sapi di tahun 2016 adalah 69.365 ton. Realitanya, seperti ditunjukkan Data Statistik Peternakan (2017), impor daging sapi baik berupa daging beku maupun sapi bakalan yang digemukkan mencapai sekitar 195.764 ton. Tetapi memang belum tercapainya sasaran produksi daging sapi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses di era pemerintahan sebelumnya (Santoso, dkk., 2017).

Komoditas impor lainnya adalah garam. Sebanyak 3,7 juta ton garam industri per-bulan diimpor sepanjang 2018. Alasannya, Indonesia belum mampu memproduksi garam industri, sementara kebutuhan garam tersebut cukup tinggi dan terus meningkat

terutama untuk perusahaan di bidang petrokimia. Sebagian juga dipakai untuk industri makanan dan minuman. Pada 2017, pemerintah mengimpor garam sebanyak 75 ribu ton dari Australia untuk mengatasi kelangkaan garam di sejumlah daerah. Beberapa bulan sebelumnya, Kepolisian menangkap Direktur Utama PT Garam dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin impor dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton (BBC, 02/08/2017).

Laporan Badan Pusat Statistik (2018) menyebutkan, nilai impor garam industri dari sejumlah negara sepanjang 2017 sebesar US\$ 83,59 juta dengan volume seberat 2,55 juta ton. Sementara sepanjang 2016 impor garam senilai US\$ 86,01 juta. Walau terjadi sedikit penurunan pada 2017, namun dari sisi volume mengalami kenaikan sebanyak 2,14 juta ton.

**Tabel 02. Garam Impor Indonesia 2016-2017**

Negara Asal	Nilai	
	2016	2017
Australia	US\$ 70,33 juta	US\$ 76,09 juta
India	US\$ 12,56 juta	US\$ 5,75 juta
Selandia Baru	US\$ 1,22 juta	US\$ 1,16 juta
Denmark	US\$ 126,66 ribu	US\$ 203,22 ribu
Jerman	US\$ 158,18 ribu	US\$ 1,03 juta
Negara Lainnya	US\$ 275,20 ribu	US\$ 757,43 ribu

Sumber: BPS, 2021

Perluahkah impor garam? Di satu sisi, kalangan industri memandang bahwa keputusan pemerintah mengimpor garam sebagai sesuatu yang wajar karena adanya ketimpangan antara produksi dan konsumsi garam nasional. Sekjen Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara mengatakan, produksi garam nasional pada 2016 hanya mencapai 144 ribu ton dari kebutuhan sebanyak 4,1 juta ton. Kebutuhan tersebut, 780 ribu ton untuk konsumsi publik, sedangkan sisanya untuk keperluan industri. Faktor cuaca (*la nina*) berikut metode produksi (yang masih sederhana dan tradisional) dianggap sebagai penyebab rendahnya produksi garam dalam negeri. Selain itu, kawasan pantai yang cocok untuk tambak garam hanya 26.024 hektare dari 99.093 kilometer bentangan pantai Indonesia (BBC, 02/08/2017).

Jenis pangan lainnya yang ikut diimpor pemerintah adalah cabai (lombok). BPS mencatat impor cabai pada periode Oktober 2021 melonjak sangat tajam. Impor cabai tercatat sebanyak 44.591.583 kg. Jumlah ini naik 1.774% dibandingkan Oktober 2020 yang hanya 2.378.576 kg. Impor cabai ini tertinggi berasal dari India sebanyak 44.246.981 kg. Kemudian dari China sebanyak 323.723 kg, lalu dari Malaysia sebanyak 9.581 kg. Impor cabai juga berasal dari Spanyol sebanyak 150 kg serta dari Taiwan sebanyak 6.474 kg (CNBC Indonesia, 6/12/2021).

Harga cabai memang naik hingga setidaknya pekan pertama Desember 2021 sebagaimana terlihat dari hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia. Catatan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan harga cabai-cabaian bergerak naik per 6 Desember 2021. Harga rata-rata nasional cabai merah keriting adalah Rp 45.600/kg. Naik 9,75 persen dibandingkan sebulan sebelumnya. Kemudian harga cabai rawit hijau pada 6 Desember 2021 seharga Rp 49.900/kg; melejit 53,3 persen dalam sebulan. Ada lagi cabai rawit merah yang pada 6 Desember 2021 harganya mencapai Rp 65.100/kg. Tercatat meroket 82,86 persen selama sebulan terakhir. Kenaikan harga cabai pun menjadi utama inflasi. Inflasi Desember 2021



sebesar 0,25 persen dibandingkan bulan sebelumnya (*month-to-month/mtm*). Hal ini membuat inflasi sepanjang 2021 menjadi 1,55 persen. Harga cabai menyumbang 0,04 persen terhadap inflasi tersebut (*CNBC Indonesia, 6/12/2021*).

Jauh sebelumnya, pada 2017, pemerintah juga mengimpor cabai dari berbagai negara seperti India, China, dan Thailand. Cabai tersebut merupakan jenis cabai kering (yang dari India ada tulisan “India Teja” dan yang dari China ada tulisan “Triple A”). Cabai kering tersebut turut membanjiri pasar di Mataram, Nusa Tenggara Barat, misalnya. Cabai kering impor banyak diminati konsumen karena harganya lebih murah yakni antara Rp 60 – 100 per kg (*Suarantb, 28/2/2017*).

Impor cabai tersebut terlihat berseberangan dengan kebijakan Kementerian Pertanian yang memastikan tidak ada impor cabai. Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto mengatakan tidak ada impor meskipun terjadi kenaikan harga cabai. Pemerintah pun menjamin pasokan cabai ke pasaran selalu ada dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk kebutuhan cabai di Jakarta, misalnya, dilakukan oleh PT Rajawali Nusindo (anak Perusahaan PT RNI). Perusahaan ini berperan sebagai *off taker* yang menjembatani antara petani cabai dan Pasar Induk Kramat Jati (*Okezone, 14/3/2021*).

Pada tahun 2021 pemerintah tetap menerapkan kebijakan impor sejumlah komoditas pangan. BPS mencatat dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2021, Indonesia mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok senilai US\$ 8,37 miliar atau setara dengan Rp 118,9 triliun (kurs Rp 14.200/US\$). Padahal sebagian bahan pangan yang diimpor Indonesia masih bisa dihasilkan di negeri sendiri, seperti kentang, kopi, teh, cengkeh, ubi kayu atau singkong, jagung, hingga beras (*CNBC Indonesia, 24/9/2021*).

**Tabel 03. Impor Pangan Sepanjang Januari – Agustus 2021**

Komoditas	Volume	Nilai	Negara Asal
Beras	277.514,7 ton	US\$ 124,8 juta	India, Thailand, Pakistan, Vietnam, Myanmar, dan negara lainnya
Daging Ayam	23,2 ton	US\$ 86.901	Prancis dan Singapura
Telur Unggas	1.258,4 ton	US\$ 6,5	India, Ukraina, Jerman, Denmark, Amerika Serikat, dan negara lainnya
Jenis Lembu	105.266,6 ton	US\$ 384,2 juta	Australia
Daging Jenis Lembu	130.923,7 ton	US\$ 474,6 juta	Australia, India, Brazil, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan negara lainnya
Cabe	32.446 ton	US\$ 69,4 juta	India, China, Malaysia, Spanyol, Taiwan, dan negara lainnya
Susu	200.015,5 ton	US\$ 577 juta	Selandia Baru, Amerika Serikat, Belgia, Australia, Perancis, dan negara lainnya
Gula	4,3 juta ton	US\$ 1,8 miliar	India, Australia, Brazil, Thailand, Korea Selatan, dan negara lainnya
Bawang Putih	309.287,3 ton	US\$ 337,1 juta	China, Amerika Serikat, Australia, India, Jerman, dan negara lainnya

Kedelai	1,9 juta ton	US\$ 1,2 miliar	Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Brazil, Malaysia, dan negara lainnya
Jagung	592.101,7 ton	US\$ 167,9 juta	Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Pakistan, Thailand, dan negara lainnya
Gandum dan Meslin	7,3 juta ton	US\$ 2,2 miliar	Australia, Kanada, Ukraina, Argentina, Amerika Serikat, dan negara lainnya
Tepung Gandum atau Meslin	17.328,6 ton	US\$ 6,7 juta	India, Vietnam, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan negara lainnya
Garam	1,7 juta ton	US\$ 61,5 juta	Australia, India, Selandia Baru, Jerman, China, dan negara lainnya
Minyak Goreng Nabati	38,748,6 ton	US\$ 62,6 juta	Malaysia, Thailand, Australia, Italia, Filipina, dan negara lainnya
Lada	242,3 ton	US\$ 1,1 juta	Vietnam, Thailand, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, dan negara lainnya
Mentega	11.635,2 ton	US\$ 67,9 juta	Selandia Baru, Belanda, Belgia, Prancis, India, dan negara lainnya
Kentang	26.288,9 ton	US\$ 11,9 juta	India, Mesir, Inggris, Kanada, Australia, dan negara lainnya
Ikan Segar	507,8 ton	US\$ 5,4 juta	Norwegia, Australia, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan negara lainnya
Kelapa	1.892,2 ton	US\$ 3,2 juta	Filipina, Thailand, Malaysia, Australia, dan negara lainnya
Teh	7.133,9 ton	US\$ 14,9 juta	Vietnam, Kenya, Jepang, Thailand, Taiwan, dan negara lainnya
Kopi	11.200,3 ton	US\$ 23,7 juta	Vietnam, Brazil, Malaysia, Swiss, Amerika Serikat, dan negara lainnya
Cengkeh	4.196,6 ton	US\$ 27,5 juta	Madagaskar, Malaysia, Singapura, Jepang, Inggris, dan negara lainnya
Kakao	158.848,2 ton	US\$ 398,8 juta	Pantai Gading, Ekuador, Nigeria, Kamerun, Ghana, dan negara lainnya
Tembakau	71.677,4 ton	US\$ 369 juta	China, Brazil, Amerika Serikat, Turki, Jerman, dan negara lainnya
Ubi Kayu	5 kilogram	US\$ 86	Taiwan dan Hong Kong

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com> (2021)

Ketika impor pangan terus berlangsung, sementara ekspor berbagai komoditas justru sangat lemah dan berada di arus kecil. Menarik apa yang dikatakan ahli ekonomi Anthony Budiawan bahwa Indonesia bangsa besar tetapi ekspornya terendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Juga, angka kemiskinan kita tergolong tinggi sekitar 70-an juta (atau 20 persen lebih dari total jumlah penduduk). Bandingkan dengan Vietnam, misalnya, yang hanya sekitar 6,6 persen penduduk miskinnya. Jadi, Indonesia termiskin saat ini (Wawancara Anthony Budiawan dengan Refly Harun Channel 2021).

Menurut catatan BPS, Indonesia masih melakukan impor buah senilai Rp 22.5 triliun. Misalnya, mengimpor jeruk dari China dan Pakistan, juga impor apel dan lain-lain pada 2019 sebesar 724 ribu ton. Jika kebutuhan domestik disandarkan pada impor, maka akan terjadi pelemahan produksi buah lokal, serta mengakibatkan ketergantungan negara pada skema impor (JPNN, 11/11/2020).

Kemudian, setiap roti dan mie instan yang dimakan adalah impor karena bahan bakunya 100 persen adalah impor. Setidaknya, 10 juta ton gandum didatangkan dari negara lain terutama Australia. Lebih dari 90 persen bawang putih yang digunakan untuk membuat sambal ayam geprek didatangkan dari China. Hampir tiga perempat kedelai yang digunakan untuk membuat tahu dan tempe mayoritas (90 persen lebih) diimpor dari Amerika (JPNN, 11/11/2020).

### **Kritik terhadap Kebijakan Impor Pangan**

Impor pangan yang dilakukan oleh pemerintahan Joko-JK dan Joko-Ma'ruf mendapat kritik berbagai kalangan. Tidak hanya dari kelompok-kelompok kritis dan yang berada di barisan oposisi, melainkan juga dari kalangan internal pemerintahan sendiri.

Kalangan petani, misalnya, menyatakan kritiknya dengan membentangkan poster bertuliskan "Stop Impor Beras", saat aksi tunggal di area persawahan Desa Undaan, Kudus, Jawa Tengah (15/1/2018). Aksi tersebut sebagai wujud harapan petani agar pemerintah tidak mengimpor beras saat musim panen tiba karena dianggap mengakibatkan turunnya harga gabah dan dapat merugikan petani (Kompas, 19/1/2018).

Masa panen padi berlangsung pada Maret 2018. Dengan masa panen tersebut ditakuti beras impor yang masuk akan membuat harga gabah di tingkat petani turun. Impor beras mestinya tidak dilakukan menjelang musim panen dan untuk memperkuat stok beras sehingga tidak terjadi gejolak harga, bukan untuk membanjiri pasar yang membuat harga beras produksi petani turun tajam (Wawancara Berly Martwardaya dalam *Kompas*, 19/1/2018).

Pengurus Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor Fathoni Ali, menyebutkan, impor beras seharusnya pada saat harga beras mulai naik disebabkan stok beras menipis, sekitar September dan Oktober. Pada bulan-bulan itu masa panen masih cukup lama. Sementara bulan Januari sudah mendekati masa panen. Karena itu, impor bermasalah jika dilakukan Januari karena segera musim panen (Wawancara Fathoni Ali dalam *Kompas*, 19/1/2018).

Kebijakan impor bisa diputuskan di rapat Kemenko. Tetapi kenapa *kok* justru yang mengumumkan impor beras malah Menko Perekonomian sendiri. Lebih aneh lagi, kondisi ketersediaan beras sampai Mei 2021 sebenarnya masih aman dan tidak perlu impor. Lalu, data siapa yang sebenarnya digunakan untuk memutuskan impor ini? Di sinilah pentingnya data. Sebab, BPS dan Kementan serta Bulog mengatakan tidak perlu ada impor (Wawancara dengan Luluk Nur Hamidah, 24 Maret 2021).

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi menyebutkan, potensi luas lahan panen padi pada *subround* Januari hingga April 2021 mencapai 4,86 juta hektare. Artinya, ada kenaikan 1,02 juta hektare (26,53 persen) dibandingkan *subround* Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektare. Jika potensi produksi padi pada 2020 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan

penduduk, produksi beras pada 2020 diperkirakan sebesar 31,63 juta ton, naik 314,10 ribu ton atau 1 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 31,31 juta ton. Merujuk pada data BPS dan Kementan, maka tidak ada relevansi bagi pemerintah melakukan impor beras pada 2021. Kecuali ada niat lain yang atas nama “defisit” stok beras, sehingga memaksakan impor beras (Wawancara dengan Badiul Hadi, 24 Maret 2021).

Neraca perdagangan mengalami defisit terbesar sepanjang sejarah pada 2018. Lonjakan defisit perdagangan minyak dan gas (migas) merupakan biang keladi. Namun, biang keladi sebetulnya justru pada anjloknya surplus perdagangan non-migas sebagai imbas lonjakan impor di sektor tersebut (*Katadata*, 16/1/2019).

Kembali ke soal impor beras pada awal 2021. Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai (rencana) Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak sesuai dengan visi Presiden Joko yaitu berdikari. Bagi Hasto, Menteri Lutfi mengambil langkah yang tidak sesuai dengan visi berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari Presiden Joko. Menteri Lutfi memotong visi-misi presiden di tengah jalan. Mengapa mesti mengimpor beras dan garam? (*CNN Indonesia*, 25/3/2021).

Menarik, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun (ketika itu), turut menyesalkan keputusan pemerintah mengimpor garam. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Menteri Susi mengeluhkan jajaran kabinet lainnya yang tidak mengindahkan saran yang diberikannya. Bagi Menteri Susi, impor garam hingga 3,7 juta ton itu *overrated*. Kementerian KKP, kata Menteri Susi, sudah melakukan survei ke para petani garam. Rekomendasi dari Kemen-KKP adalah pemerintah tidak perlu impor garam industri sebab di dalam negeri produksi garam bagus dan bisa dipakai (*Republika*, 23/1/2018).

Jika Ombudsman Republik Indonesia menilai sejumlah kasus impor beras sebagai langkah yang tidak tepat, bahkan dikatakan sebagai praktik maladministrasi (ORI, 2018). Sementara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tegas menyatakan, impor beras oleh pemerintah tidak berdasarkan data valid. BPK mengakui, data kebutuhan dan suplai beras di Indonesia saat ini masih tumpang-tindih. Dari penerbitan persetujuan impor pada 2015 hingga semester I-2017, misalnya, ditemukan banyak persetujuan impor yang ditetapkan dengan tidak mempertimbangkan jumlah data kebutuhan dan produksi nasional (*Viva*, 21/5/2018).

### **Perburuan Rente dalam Impor Pangan**

Impor pangan yang dilakukan pemerintah sesungguhnya tidak sepenuhnya karena kondisi objektif untuk harus impor. Tidak sedikit dari kegiatan impor itu justru karena permainan elite untuk memburu selisih keuntungan dari berbagai jenis pangan yang diimpor. Katakanlah seperti beras, seringkali diimpor secara besar-besaran dan di situlah elite politik yang bekerjasama dengan pengusaha (penerima izin impor) menarik keuntungan besar. Banyak kalangan mengatakan bahwa dalam impor pangan selama ini ada mafia dan kelompok pemburu rente di dalamnya.

Impor pangan tentu saja mendatangkan keuntungan besar bagi pelakunya atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Godaan keuntungan besar itulah yang seringkali menjadi pertimbangan utama terbitnya kebijakan impor pangan. Tentu saja ada kegiatan impor oleh pemerintah yang benar-benar karena kondisi objektif yang mengharuskan impor. Persoalannya, ketika impor pangan dilakukan di luar tuntutan objektif, maka di situlah upaya memburu rente oleh para pemburu rente terjadi.

Di zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid, misalnya, Menteri Perdagangan sekaligus Kepala Bulog Jusuf Kalla menjadi aktor penting dalam impor beras.

*“JK itu memang suka membisniskan pengetahuan (infomasi) yang ada di pemerintahan. Waktu itu dia berhasil membujuk Presiden Abdurrahman Wahid untuk impor beras sebanyak 2 (dua) juta ton. JK meminta pengusaha Aksa Mahmud –yang masih kerabatnya sendiri– untuk melakukan impor beras, dan untungnya sangat besar. Presiden Abdurrahman Wahid belakangan baru tahu soal itu, dan JK pun dipecat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Bulog”* (Wawancara Rizal Ramli dengan Refly Harun Channel, 2021).

Itulah sebuah gambaran sederhana bagaimana terjadinya usaha memburu rente dalam impor pangan. Praktik memburu rente sesungguhnya terus terjadi dan cenderung semakin mengental dalam impor pangan di era Joko-JK dan Joko-Ma’ruf selama ini. Setiap muncul kebijakan impor pangan, di situlah muncul dan terjadi permainan perburuan rente. Mafia impor pun hadir di dalamnya.

Dalam kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal 2021, misalnya, praktik perburuan rente diduga terjadi. Kebijakan ini juga menuai polemik berkepanjangan, dan salah satu yang menjadi sorotan adalah anggapan bahwa impor beras tersebut memicu terjadinya perburuan rente.

Ketua Dewan Nasional Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin menduga ada pihak yang memang memaksakan rencana impor beras di tengah panen raya. Menurutnya, perkara ini tampaknya bukan lagi soal perlu atau tidaknya impor beras, melainkan lebih pada soal di mana ada pihak-pihak yang berkepentingan supaya impor dilakukan. Iwan mencurigai hal ini erat kaitannya dengan perburuan rente, seperti biaya politik reguler aktor-aktor politik sampai ke biaya masa depan tim sukses (dalam pemilihan umum). Terlihat polanya tidak rasional (*CNBC Indonesia*, 26/3/2021). Lebih jauh Iwan menyebutkan:

*“Komoditas beras bersama komoditas lain seperti daging sapi, gula hingga garam memiliki margin yang sangat besar. Saya hitung-hitungan kasar aja, 1 juta ton sama dengan 1 miliar kg. Hari ini disparitas harga maksimal Rp 3.000/kg. Ada potensi gross untung kotor Rp 3 triliun. Kalau kita lihat dengan kecepatan impor, kemudian pengapalan, distribusi, pergudangan taruhlah terpotong 50%. Masih ada sisa keuntungan Rp 1,5 triliun. Dalam suasana lesu gini, tampaknya satu-satunya harapan cuan politik itu tersisa tentu impor pangan ini”* (*CNBC Indonesia*, 26/3/2021).

Bagi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, (rencana) impor beras sebanyak 1 juta ton (2021) merupakan strategi pemerintah agar tidak didikte oleh spekulasi dan pedagang. Menurut Menteri Luthfi, importasi merupakan mekanisme pemerintah untuk mengintervensi pasar (*CNN Indonesia*, 15/3/2021). Senada dengan Menteri Lutfi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah mengimpor beras untuk menjaga pasokan dan harga beras di dalam negeri (*CNN Indonesia*, 15/3/2021).

Kebijakan impor tahun 2021 itu dinilai Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak. terlalu dipaksakan, sehingga kecurigaan masyarakat soal kuatnya mafia pangan memengaruhi kebijakan pemerintah sulit dibantah. Justru yang penting Presiden Joko membuktikan janjinya memberantas mafia pangan dan para pemburu rente ekonomi yang merugikan rakyat (*Tribunnews*, 14/3/2021). Menurutnya, dugaan



adanya praktik berburu rente oleh *rent-seekers* didasarkan pada adanya selisih harga beras di pasar dalam negeri dan internasional begitu tinggi yaitu sekitar Rp 2.400 per-kilogram. Dengan jumlah impor beras mencapai 1 juta ton, maka nilai marginnya mencapai Rp 2,4 triliun. Mafia pangan menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi. Mereka mengendalikan rantai distribusi pangan bahkan masuk ke pemerintahan dan mengatur kebijakan (Wawancara Amin Ak dengan berbagai media, 2021).

Senada dengan Amin, apa yang dikatakan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ansy Lema. Lema melihat praktik perburuan rente dalam impor buah. Menurutnya, praktik kolusif kebijakan impor selain merugikan petani buah lokal, juga ada praktik berburu rente di dalamnya. Itu hanyalah ujung dari puncak gunung es praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam skema impor buah. Kebijakan impor memang selalu menjadi lahan subur bagi para politisi dan birokrat yang gemar berburu rente untuk kepentingan pribadi (*JPNN*, 11/11/2020). Dugaan ketidakberesan yang mewujudkan sebagai permainan para mafia dan para pemburu rente juga terjadi dalam impor gula. Disinyalir ada kerugian negara hampir Rp 3 triliun per-tahun dalam kasus impor gula. DPR, dalam konteks ini, didesak untuk berani membuat terobosan dalam rangka memberantas mafia gula (*Hukumonline*, 27/10/2010).

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar mengatakan, saat ini, ada beberapa dasar hukum kebijakan gula nasional yang ditetapkan Pemerintah, yaitu SK Menperindag No. 643/2002 tentang Tata Niaga Impor Gula, PP No. 19 Tahun 2004 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan. Untuk meminimalisir adanya mafia gula, perlu beberapa hal, antara lain; diberlakukannya kebijakan bea masuk impor gula yang lebih tinggi pada saat harga gula impor lebih kecil dari harga domestik. Izin impor gula hanya diberikan kepada pabrik gula yang minimum 75 persen tebusnya berasal dari petani, dan pemberian izin impor gula diproses oleh satu lembaga.

Sementara itu, Dewan Pakar Wahana Masyarakat Tani Indonesia (Wamti) Suparapto mengatakan bahwa negara hampir dirugikan sekitar Rp 3 triliun dalam setahun akibat ulah mafia gula. Untuk itu, perlu adanya sanksi yang berat kepada para raja gula yang melakukan pelanggaran (*Hukumonline*, 27/10/2010). Pemburuan rente juga terjadi dalam impor beras. Kebijakan impor beras pada awal 2018, misalnya, tidak efektif menjaga stabilitas harga karena *timing* impor yang terlambat. Selain itu, ada indikasi kehadiran pemburu rente yang terlihat dari gagalnya tujuan pemerintah menstabilkan harga beras. Praktik perburuan rente merugikan masyarakat karena berdampak terhadap masih tingginya harga saat kebijakan impor dilakukan (*Hukumonline*, 27/10/2010).

Tidak hanya pada komoditas beras, praktik pemburu rente terjadi pula pada komoditas pangan lain seperti gula, kedelai, bawang putih hingga daging. Bahkan, KPPU pernah menyatakan bahwa industri gula nasional saat ini dikuasai oleh sekelompok pengusaha yang dapat mengatur harga serta pasokannya. KPPU pun menyebut kelompok pengusaha tersebut dengan istilah "Samurai Gula" (*Hukumonline*, 27/10/2010). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sejumlah temuan di mana banyak permasalahan dalam tata niaga impor pangan, seperti cacat perizinan, cacat data, cacat dokumen persyaratan, dan cacat prosedur. Temuan BPK tersebut merupakan bagian dari indikasi praktik pemburu rente yang terjadi dalam tata niaga impor pangan selama ini (*Hukumonline*, 27/10/2010).

Banyak pihak yang berkepentingan dengan kebijakan pemerintah mengimpor pangan. Aktor utama sekaligus yang paling berkepentingan tentu pemerintah sendiri,

setidaknya kelompok tertentu dalam tubuh pemerintah atau bisa juga pejabat tertentu yang memiliki otoritas untuk itu. Pelaku bisnis (ekspor-impor maupun bukan), para *broker* (ekonomi dan politik), dan partai politik turut menjadi aktor dalam kebijakan impor pangan. Mereka pula yang mendorong dan turut menciptakan atau merekayasa kondisi yang mendukung lahirnya kebijakan impor pangan tersebut.

Rekayasa politik di balik kebijakan impor pangan untuk tujuan sempit dan pragmatis para aktor merupakan kenyataan yang sulit ditepis. Otoritas yang dimiliki pemerintah untuk membuat kebijakan impor dimanfaatkan sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan (ekonomi dan politik) dan kehendak memburu rente (*rent-seeking*). Dengan demikian, sulit untuk tidak mengatakan telah terjadi penyalahgunaan otoritas yang dimiliki; tidak untuk kepentingan publik melainkan untuk kepentingan sempit orang-orang atau kelompok (kecil) tertentu.

Pakar ekonomi Rizal Ramli tanpa ragu mengatakan bahwa keuntungan dalam impor pangan merupakan komisi besar yang diburu dan didapat oleh pejabat yang melakukan impor beras. Menurutnya, dalam sejarah politik Indonesia, uang paling mudah diperoleh dari impor komoditi. Untuk itu, para aktor bermainnya di komoditas gula, beras, kedelai, dan daging. Uang yang beredar di dalamnya gampang untuk *dicolong*. "Pengalaman saya saat di Bulog, Kementerian Perdagangan maunya impor saja karena ada komisi US\$ 20-30 dolar per-ton. Transaksinya semua di luar negeri, akun banknya juga di luar negeri." (*RMOL*, 12/1/2018).

Apa yang dikatakan Ramli soal komisi besar bagi pejabat serta indikasi kongkalikong yang disinyalir sejumlah Anggota DPR bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Banyak kasus dalam kebijakan impor pangan sebelumnya yang mendukung pernyataan itu. Sebutlah satu di antaranya kebijakan impor gula rafinasi pada 2016 yang menjerat Ketua DPD Irman Gusman (ketika itu) dalam lingkaran suap-menyuap. Juga, sebelumnya kasus impor sapi dan/atau daging sapi yang kemudian mengantarkan Anggota DPR Luthfi Hasan Ishaq ke hotel prodeo.

Pengamat pangan Syarkawi Rouf menyebutkan, sejak awal, rezim kuota impor berpotensi melahirkan masalah hukum, baik dari aspek pidana maupun hukum persaingan usaha. Praktik korupsi (suap) dalam rezim kuota impor sangat mudah terjadi karena hampir semua komoditas pangan memiliki disparitas harga yang tinggi antara harga dalam negeri dan harga internasional. Dalam kasus impor gula, misalnya, terdapat selisih harga. Harga pokok gula yang ditetapkan pemerintah Rp 9.100 per-kilogram, sementara harga internasional Rp 6.500 per-kilogram. Faktanya, harga gula di pasar domestik masih Rp 13.000 dan bahkan pernah Rp 16.000-Rp 17.000 per-kilogram (*Kompas*, 21/9/2016).

Upaya maraup rente pernah juga terjadi dengan memanfaatkan kebijakan Menteri Perdagangan yang mewajibkan seluruh transaksi gula rafinasi melalui lelang. Perusahaan yang ditunjuk berkantor di Gedung Artha Graha. Adapun setiap ton yang ditransaksikan dikenakan ongkos administrasi sebesar Rp 85.000. Banyak lagi kutipan lainnya yang dibebankan kepada peserta tender. Pengguna gula rafinasi mengajukan keberatan. Setelah Ketua KPK melayangkan surat "peringatan" akhirnya Menteri Perdagangan mencabut Permen wajib lelang tersebut (*Katadata*, 16/1/2019).

Ada mafia di balik kebijakan pemerintah mengimpor beras belakangan ini. Mafia tersebut memiliki sumberdaya untuk memengaruhi kebijakan hingga kekuasaan untuk menentukan harga secara sepihak. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui

dirinya memiliki data soal bagaimana perburuan rente dalam kebijakan impor ini. Impor bawang, beras, gandum, jagung, garam itu semuanya ada penggerakannya. Ada pemburu rentenya, ada mafia impornya (*CNN Indonesia, 25/3/2021*). Karena itu, seringkali kebijakan impor pangan menjadi mainan para pemburu rente. Kalkulasi antara kekurangan pasokan dengan kuota impor sering menjadi perdebatan. Ujung-ujungnya petani yang rugi karena harga komoditas di pasaran menjadi jatuh. Petani sering menjadi korban (*CNN Indonesia, 25/3/2021*).

Menariknya, impor pangan tidak hanya berdimensi perburuan rente, melainkan juga sengaja dilakukan untuk kepentingan pemilihan umum. Itulah yang diintrodusir oleh pengamat pangan dan pertanian Khudori. Mengapa mesti impor, katakanlah seperti beras? Keputusan ini ada hubungannya dengan pemilu. Misalnya, beras impor masuk mulai akhir Januari 2018. Kemudian, pemerintah mengestimasi bahwa pada awal Februari 2018 akan terjadi panen raya. Hal ini berpotensi menekan harga gabah dan beras jauh lebih dalam. Impor itu bukannya rugi, melainkan untung. Kepentingan politiknya terletak di sini; ada peluang mencari dana segar untuk kepentingan politik (*Nusantaranews, 30/1/2018*).

Jika demikian adanya, sungguh mengindikasikan bahwa pola-pola politik ekstraktif –seperti dikemukakan Acemoglu dan Robinson– terjadi dalam konteks kebijakan impor pangan. Di satu sisi, ada upaya-upaya sistematis dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan di masyarakat, termasuk dengan melakukan impor. Namun, di sisi lain, pemerintah atau badan tertentu dari pemerintah yang menangani urusan pangan berusaha memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil keuntungan ekonomi dari kebijakan impor pangan yang dilakukan.

## **Kesimpulan**

Pangan (*food*) sesungguhnya bukan sekadar barang (ekonomi) untuk diproduksi secara massal, melainkan juga menjadi wujud kepentingan dalam konteks politik. Dimensi non-ekonomi (politik) dari pangan muncul ketika pangan dirumuskan dan diimplementasikan dalam kebijakan negara; kebijakan impor pangan. Karena itu, pangan adalah pula bagian dari persoalan politik. Dimensi non-ekonomi dalam kebijakan impor terlihat ketika para pejabat negara, politisi, dan aktor “berlabel” negara lainnya mendorong dilakukannya impor pangan dan pada waktu yang sama mereka memiliki kepentingan ekonomi yang besar di dalamnya.

Impor pangan yang tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di era Joko-JK dan Joko-Ma’ruf, memberikan setidaknya dua isyarat. Pertama, pemerintah memiliki komitmen politik yang rendah untuk mewujudkan swasembada pangan. Hal ini sekaligus pertanda pemerintah tidak serius membangun dan menegakkan kedaulatan pangan sebagaimana pernah dijanjikan. Ketika terjadi kelangkaan pangan, maka impor pun menjadi jalan keluar sekaligus jalan pintas yang ditempuh. Kedua, kebijakan impor pangan dilakukan pada umumnya bukan karena kondisi objektif untuk harus impor, melainkan lebih karena ambisi untuk memburu rente di dalamnya.

Kebijakan impor pangan, di satu sisi menguntungkan para penentu kebijakan, politisi, korporasi tertentu, dan para pemain yang menyusu di dalamnya. Di sisi lain, tentu saja merugikan petani dan kalangan masyarakat lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis impor pangan lebih menyahterakan elite, namun tidak memberikan makna yang signifikan bagi peningkatan ekonomi masyarakat luas.

Di sinilah kemudian terjadi suatu kondisi yang ekstraktif.

### **Daftar Pustaka**

- Acemoglu, D., dan Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business.
- Aminah, S. (1999). "Ekonomi Politik Pangan dan Problema Petani". *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, Th XIII, No 1, Januari.
- Aziz SR, A. (2019). "Kebijakan Pangan dan Politik Ekstraktif", dalam Bustanul Arifin dan Lely Pelitasari (ed.), *Pangan, Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional*. Bogor: IPB Press.
- Bogdan, R., dan Tailor., S. J. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu Sosial* (terjemahan) Surabaya: Bina Ilmu.
- Damanhuri, D. S. (2019). "Ekonomi Politik Kedaulatan Pangan", dalam Bustanul Arifin dan Lely Pelitasari (ed.), *Pangan, Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional*. Bogor: IPB Press.
- Denzin, N. K. dan Lincoln, Y. S. (ed.). (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas. (2014). *Penyusunan RPJMN 2015-2019 Bidang Pangan dan Pertanian*. Jakarta: Bappenas RI.
- Haryanto, J. T. (2017). *Swasembada Pangan dan Reformasi Subsidi BBM*. Makalah tidak diterbitkan.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian*. Jakarta: Kemenko Perekonomian RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2015). *Kebijakan Pembangunan Pertanian: Upaya Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Strategis*. Jakarta: Kementan RI.
- Khudori. (2019). "Reformasi Kebijakan Perberasan", dalam Bustanul Arifin dan Lely Pelitasari (ed.), *Pangan, Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional*. Bogor: IPB Press.
- Komisi Ombudsman Republik Indonesia. (2018). *Gejala Maladministrasi dalam Pengelolaan Data Persediaan Beras Nasional dan Kebijakan Impor Beras*. Jakarta: 15 Januari.
- Krueger, A. O. (1974). "The Political Economy of Rent-Seeking Society". *American Economic Review*, 64 (3).
- Kusumah, Fabian Pratama. 2019. "Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019". *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 10 (2).
- Lassa, J. (2005). *Politik Ketahanan Pangan Indonesia 1950-2005*. Makalah tidak diterbitkan.
- Latkov, A. (2014). "Trends of Rent-Seeking Theory". *MPRA Paper*, No. 62864.
- Nasution, D. (2017). "Bangkitnya Pangan Indonesia", dalam *Geraiinfo Bank Indonesia*, Edisi 62, Tahun VII, hlm. 15.
- Nuryanti, S. (2017). "Swasembada Beras Berkelanjutan: Dilema antara Stabilisasi Harga dan Distribusi Pendapatan". *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35 (1).
- Saragih, Juli Panglima. 2016. "Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan". *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol. 17, No. 2 (Oktober).

- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. London: Sage Publications.
- Rouf, M. S. (2016). "Korupsi dan Kartel dalam Rezim Kuota", dalam *Harian Kompas*, edisi 21 September.
- Santoso, D. A., dkk. (2017). *Bidang Rembuk Kedaulatan Pangan dan Mengelola Keamanan Pangan*. tanpa kota, tanpa penerbit.
- Sawit, H. (2008). "Perum Bulog dalam Inpres Perberasan No. 3/2007: Evaluasi Kebijakan dan Implementasinya". *Jurnal Pangan*, Edisi No. 50/XVII/Januari-Juni.
- Segara, T. (2017). "Inisiatif Membangun Ketahanan Pangan Nasional", dalam *Geraiinfo Bank Indonesia*, Edisi 62, Tahun VII, hlm. 4-5.
- Strauss, A., dan Corbin, J. (1997). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Yin, R. K. (1993). *Applications of Study Case Research*. Newbury Park, California: Sage Publications.
- Wuisman, Jan J. J. M. (2013). *Teori & Praktik: Memperoleh Kembali Kenyataan supaya Memperoleh Masa Depan*. Jakarta: YOI.

### **Media Cetak**

- Harian Padang Ekspres*. 2014. Edisi 20 November.
- Investor Daily*. 2016. Edisi 1 April.
- Investor Dailay*. 2018. Edisi 17 Januari.

### **Sumber Online**

- "A Catch-22 from China that could derail Indonesia's Widodo" (12 May 2018), dalam <http://www.scmp.com/week-asia/politics> (diakses 14 Mei 2018).
- "Adanya Impor Beras Bisa Buktikan Kuatnya Mafia Pangan Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah", dalam <https://www.tribunnews.com> (diakses, 8 September 2021).
- "Akademisi Kritik Kebijakan Impor Beras yang Dilakukan Jelang Panen" (19/01/2018), dalam <https://ekonomi.kompas.com> (diakses 17 Maret 2020). "Ansy Lema DPR RI: Mafia dan Pemburu Rente Impor Buah Harus Diberantas", dalam <https://www.jpnn.com> (diakses, 8 September 2021).
- Antara*, 30 November 2017.
- Anthony Budiawan. 2021. Wawancara dengan *Refly Harun Channel*. November.
- "BPK Sebut Impor Beras Pemerintah Tak Berdasarkan Data" (21/05/2018), dalam <https://www.viva.co.id> (diakses 22/05/2018).
- "Defisit Pangan US\$ 9,2 M", dalam <http://www.kemenperin.go.id>, (diakses 5 Januari 2018).
- "Di Balik Kebijakan Impor Beras 500 Ribu Ton" (13/01/2018), dalam <http://www.ekonomi.metrotvnews.com> (diakses, 04/02/2018).
- Faisal Basri. 2018. "Impor Beras Sejak Orde Baru Soeharto hingga Kini", dalam <https://faisalbasri.com> (diakses 2 Juli 2020). "Faisal Basri Soroti Impor Pangan dan Baja Penyebab Defisit Neraca Dagang", dalam <https://katadata.co.id> (diakses 15 September 2021).
- "Harga Cabai Rawit Merah Mahal, Kementan Pastikan Tak Ada Impor", dalam <https://economy.okezone.com> (diakses 12 September 2021).
- "Indef: Kebijakan Swasembada Pangan Kementan Tak Tepat" (10/07/2017), dalam <https://www.republika.co.id> (diakses 10 Januari 2020).
- "Indonesia Negara Maritim Tapi Mengapa Harus Mengimpor Garam?" (02/08/2017), dalam <http://www.bbc.com> (diakses 10 Desember 2017).
- "Impor Beras Diklaim Strategi Lawan Mafia", dalam <https://www.cnnindonesia.com> (diakses 8 September 2021).



- “Impor Beras Bukti Kedaulatan Pangan Telah Gagal” (30/01/2018), dalam <https://nusantara.news> (diakses 4 Februari 2018).
- “Kontroversi Impor Pangan di Awal Tahun Politik, Ada Apa?” (23/01/2018), dalam <http://www.republika.co.id> (diakses 4 Februari 2018).
- “Kebijakan Impor Pangan Dinilai Untungkan Pemburu Rente”, dalam <https://www.hukumonline.com> (diakses 8 September 2021).
- “Kebijakan Swasembada Pangan Kementan Tak Tepat” (10 Juli 2017), dalam [republika.co.id](http://www.republika.co.id) (diakses 5 Januari 2018).
- “Lima Fakta di Balik Keputusan Pemerintah Impor Beras Saat Indonesia Mampu Swasembada” (13 Januari 2018), dalam [merdeka.com](http://www.merdeka.com) (diakses 17 Maret 2018).
- Luluk Nur Hamidah (Anggota Komisi IV DPR RI), 24 Maret 2021, dalam <https://infoanggaran.com> (diakses, 10 September 2021).
- “Manisnya Bisnis Gula Dinikmati Para Mafia”, dalam <https://www.hukumonline.com> (diakses 8 September 2021).
- “Ombudsman Pertanyakan Siapa yang Dapat Untung dari Impor Beras” (15/01/2018), dalam <https://nasional.kompas.com> (diakses 25/01/2018).
- “PDIP Kritik Rencana Impor Beras: Visi Jokowi Dipotong Mendag”, dalam <https://www.cnnindonesia.com> (diakses 10 Juni 2021).
- “Politisi Golkar: Impor Beras Tak Sejalan dengan Nawacita Jokowi” (12/01/2018), dalam <https://nasional.kompas.com> (diakses 25/01/2018).
- “Rizal Ramli: Ada Komisi Besar untuk Pejabat yang Impor Beras” (12/01/2018), dalam <http://nusantara.rmol.co> (diakses 25/01/2018).
- Rizal Ramli. 2021. Wawancara dengan *Refly Harun Channel*, November.
- “RI Jor-joran Impor Cabai: Dari China, India Sampai Spanyol!”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com> (diakses 10 Desember 2021).
- “Selain dari India, Cabai Impor Asal Thailand dan Cina Juga Beredar di Mataram”, dalam <https://www.suarantb.com> (diakses 12 September 2021).
- “Selamat Hari Tani! 26 Bahan Pangan Ini Masih RI Impor Lho”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com> (diakses 20 September 2021).
- “Ssst! Ada Dugaan Uang Triliunan di Balik Rencana Impor Beras”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com> (diakses 8 September 2021).
- “Swasembada Beras ala Soeharto: Rapuh dan Cuma Fatamorgana”, dalam <https://tirto.id/swasembada> (diakses 10 September 2021).
- Tim Riset CNBC Indonesia. 2021. “Di RI 'Tongkat Kayu & Batu Jadi Tanaman', Kok Sembako Impor?”, dalam <https://cnbcindonesia.com> (diakses 1 September 2021).
- “Tolong Pak Jokowi! Harga Cabe-cabean Mahal Sekali...”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com> (diakses 10 Desember 2021).